

# Lombok Barat Index Transparansi Infrastruktur (ITI)

*Presentasi Hasil 2024*



# INTRAS



UK Government



Infrastructure  
Transparency  
Initiative

West Lombok, Indonesia

[www.infrastructuretransparency.org](http://www.infrastructuretransparency.org)

This initiative is supported by UK Government, ASEAN Economic Reform Programme through the UNDP Project "Promoting a Fair Business Environment in ASEAN"

# Content

1. Pengenalan
2. Metodologi
3. Hasil
4. Kesimpulan
5. Lampiran



# 1. Pengenalan(Introduction)

Indeks Transparansi Infrastruktur (ITI) adalah instrumen CoST yang mengukur tingkat transparansi dan kualitas proses terkait infrastruktur publik di tingkat nasional atau daerah. Dirancang secara kolaboratif dan berdasarkan praktik baik dan pembelajaran internasional, dengan tujuan menyediakan informasi berkualitas yang berfungsi untuk mendorong transparansi dan meningkatkan pengelolaan infrastruktur publik.

Transparansi untuk infrastruktur publik yang lebih efektif, inklusif dan berkelanjutan.

# Dimensions

Lingkungan yang mendukung  
(Enabling environment)



Kapasitas dan  
Proses  
(Capabilities and  
processes)

Partisipasi  
Masyarakat (Citizen  
participation)



Keterbukaan  
Informasi  
(Information  
disclosure)

# Dimensions

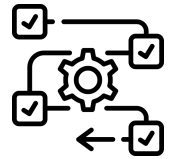
## Lingkungan yang mendukung

- Kerangka peraturan akses terhadap informasi publik
- Standar transparansi dalam infrastruktur publik
- Alat informasi digital nasional



## Kapasitas dan proses

- Pengetahuan transparansi dasar
- Kapasitas digital
- Prosedur untuk mengungkapkan informasi
- Faktor pendukung dan hambatan untuk mengungkapkan informasi
- Kontrol atas keterbukaan proyek infrastruktur



## Partisipasi masyarakat

- Peluang partisipasi
- Penggunaan informasi oleh warga negara

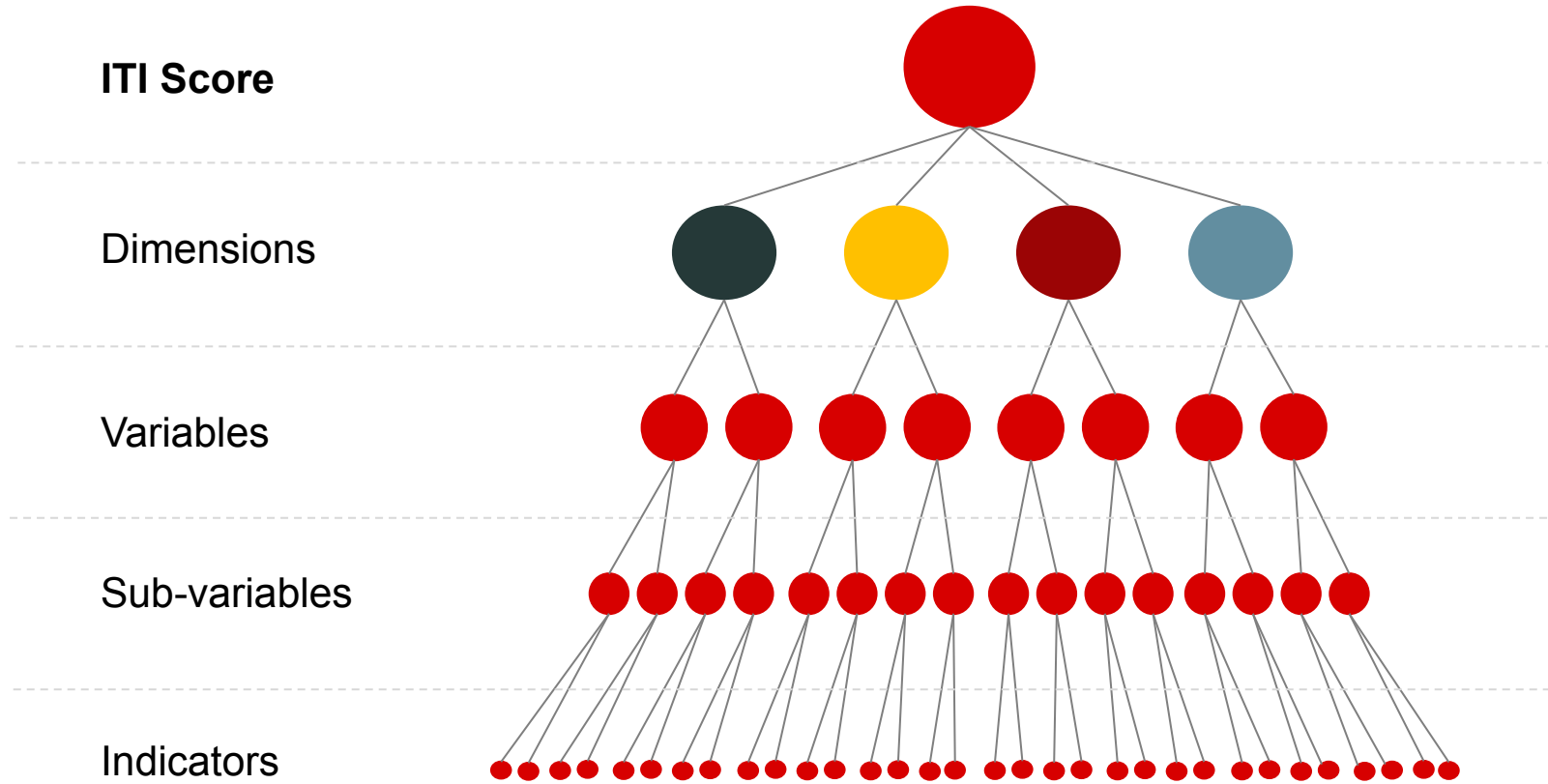


## Keterbukaan informasi

- Identifikasi proyek
- Persiapan proyek
- Pengadaan kontrak pelaksanaan dan pengawasan
- Eksekusi dan pengawasan pelaksanaan kontrak



# Structure





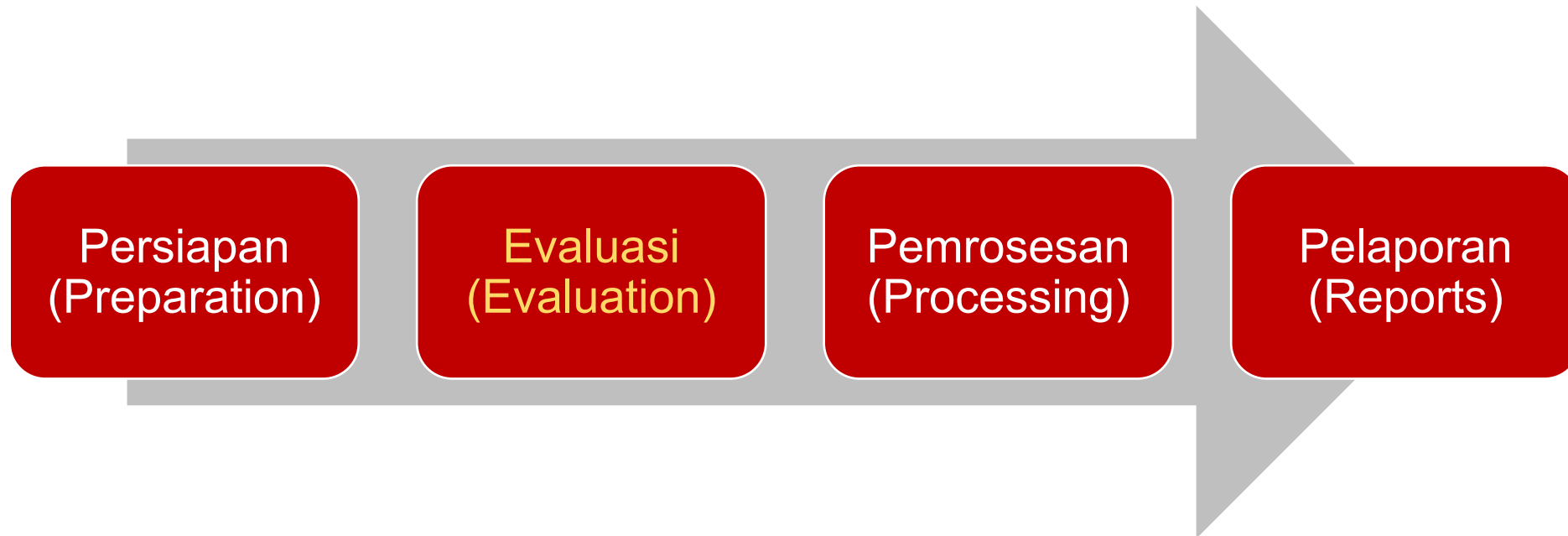
# Keluaran dan hasil

ITI menawarkan skor transparansi untuk serangkaian indikator komprehensif berdasarkan skala 100 poin yang berkontribusi pada:

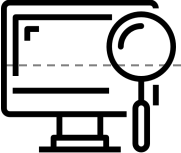
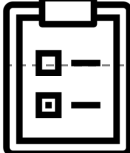
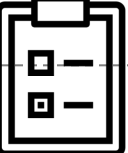
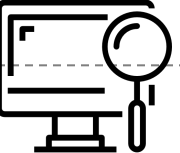
- Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan transparansi dalam infrastruktur publik.
- Memandu para pemimpin publik, pada tingkat terpusat dan desentralisasi, untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor ini.
- Mengembangkan agenda kolaboratif untuk meningkatkan standar transparansi yang berkontribusi pada infrastruktur yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

## 2. Metodologi

# Proses implementasi



# Evaluasi Metode pengumpulan data

	Lingkungan yang mendukung	Kapasitas dan proses	Partisipasi masyarakat	Keterbukaan informasi
Objek yang dievaluasi	Kondisi nasional dan atau subnasional	Entitas pengadaan	Entitas pengadaan	Proyek entitas pengadaan
Metode pengumpulan	Penelitian desktop (dokumen & komputer) 	Survey instansi 	Survey instansi 	Penelitian desktop (dokumen & komputer) 

# Evaluasi

## Sample entitas pengadaan

Proses:

1. Mendata semua pekerjaan proyek dalam periode tahun 2016-2022
2. Mengumpulkan data proyek per masing-masing Dinas
3. Mengurutkan berdasarkan nilai proyek tertinggi sampai dengan terendah pada masing-masing Dinas
4. Pengambilan dua proyek dengan proyek yang memiliki nilai kontrak tertinggi dan satu proyek acak.
5. Melakukan evaluasi sesuai form

No.	Nama Instansi
1.	Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat
3.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat
5.	Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat
6.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat
8.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat
9.	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat
10.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
11.	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga
15.	Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air
17.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Lombok Barat

## SEKTOR

Transportasi  
Kesehatan  
Perdagangan  
Pertanian  
Pendidikan  
Pariwisata  
Pengairan

- 14 Entitas merupakan instansi yang mengadakan proyek infrastruktur publik di periode antara 2016-2022
- 3 Entitas merupakan Bidang dari instansi Dinas Pekerjaan Umum

# Evaluasi

## Sample proyek

Langkah 1: Pengumpulan Data - Data proyek infrastruktur dari beberapa sumber termasuk BUMD yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Data ini mencakup detail proyek, seperti nama, jenis, sektor, anggaran, tahun pelaksanaan, dan sumber anggaran.

Langkah 2: Klasifikasi Proyek - Proyek-proyek diklasifikasikan berdasarkan sektor (misalnya, jalan, gedung, SPAM, jaringan irigasi, dan lain sebagainya) dan jumlah anggaran proyek.

Langkah 3: Seleksi Proyek - Dua proyek yang berbeda dipilih dari masing-masing kelompok sektor dan ukuran anggaran. Seleksi pertama dilakukan untuk nilai proyek tertinggi, selanjutnya pemilihan dilakukan secara acak, dan proyek-proyek yang telah dievaluasi lebih awal tidak dipilih lagi.

No.	Nama Proyek	Anggaran Proyek	Entitas Pengadaan
1	Pembangunan Dermaga Rakyat Tembowong	Rp. 8.841.187.000,00	Dinas Perhubungan
2.	Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir ( Fasilitas Darat ) Pelabuhan Tawun	Rp. 1.947.793.000,00	Dinas Perhubungan
3.	Pembangunan Pasar Gunungsari 4	Rp. 5.757.950.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4.	Pembangunan Pasar Eyat Mayang, Lembar	Rp. 1.414.203.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5.	Revitalisasi SMPN 1 Sekotong	Rp. 3.620.981.579,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Rehab Ruang Kelas SDN 1 Gelangsar	Rp. 754.620.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Renovasi Taman Giri Menang Square (GMS) Gerung Tender Ulang	Rp. 7.278.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Pemukiman
8.	Penataan Lampu Kawasan Giri Menang Square (GMS) Tender Ulang	Rp. 889.105.000,00	Dinas Perumahan Dan Pemukiman
9.	Pembangunan Gedung HCU (DAK)	Rp. 8.750.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
10.	Pembangunan Power House	Rp. 563.543.170,00	Rumah Sakit Umum Daerah
11.	Pembangunan Puskemas Banyumulek (DAK AFIRMASI)	Rp. 9.570.524.806,00	Dinas Kesehatan
12.	Pembangunan Rumah Genset (PINJAMAN DAERAH) RSUD Awet Muda Narmada	Rp. 814.170.000,00	Dinas Kesehatan
13.	Pelaksanaan Penataan Kawasan Taman Lingsar	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Pariwisata
14.	Lampu Taman Tenaga Surya (DAK)	Rp. 280.500.000,00	Dinas Pariwisata
15.	Pengadaan Rumah Kompos kapasitas 1 ton/hari	Rp. 840.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

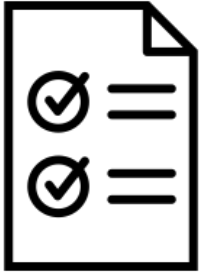
16.	Pembangunan Prasarana Perkantoran BPP Kecamatan Narmada	Rp. 500.160.700,00	Dinas Pertanian
17.	Perbaikan RPH Ruminansia Kec. Lingsar (DAK)	Rp. 332.500.000,00	Dinas Pertanian
18.	Integrasi Pergaraman	Rp. 328.633.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
19.	Rekonsiliasi/Integrasi Pegaraman di Desa Buwun Mas	Rp. 900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
20.	Pembangunan Lapak PKL TP 2019 KEMENTRIAN KOPERASI dan UKM RI	Rp. 455.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
21.	Revitalisasi Pasar Rakyat yang di Kelola oleh Koperasi	Rp. 864.500.000,00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
22.	Pembangunan Gedung Kantor BKP Gunungsari	Rp. 300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
23.	Pembangunan Gedung Kantor BKP Kediri	Rp. 300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
24.	Rehabilitasi Talud Sungai Eyat Mayang kec. Lembar	Rp. 394.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25.	Rehabilitasi Jembatan Kelep Desa Taman Sari Kecamatan Sekotong	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26.	Pembangunan Lanjutan GOR Mini	Rp. 4.800.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
27.	Rehabilitasi / perbaikan prasarana irigasi (DAK Reg) Daerah Irigasi Pesongoran Kuripan	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air
28.	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI.Keru (DAK Penugasan)	Rp. 6.458.579.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air
29.	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru-Suranadi	Rp.19.368.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga
30.	Paket I (satu) Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK Reguler Bidang Jalan) (003) Pelangan - Labuan Poh	Rp.10.160.616.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga
31.	Pembangunan Konstruksi Gedung IGD RSUD Patut Patuh Patju (Pinjaman Daerah)	Rp.80.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya
32.	Rehabilitasi Gedung Kantor PEMDA dampak Bencana	Rp.1.492.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya



# Evaluasi

## Protokol interaksi entitas

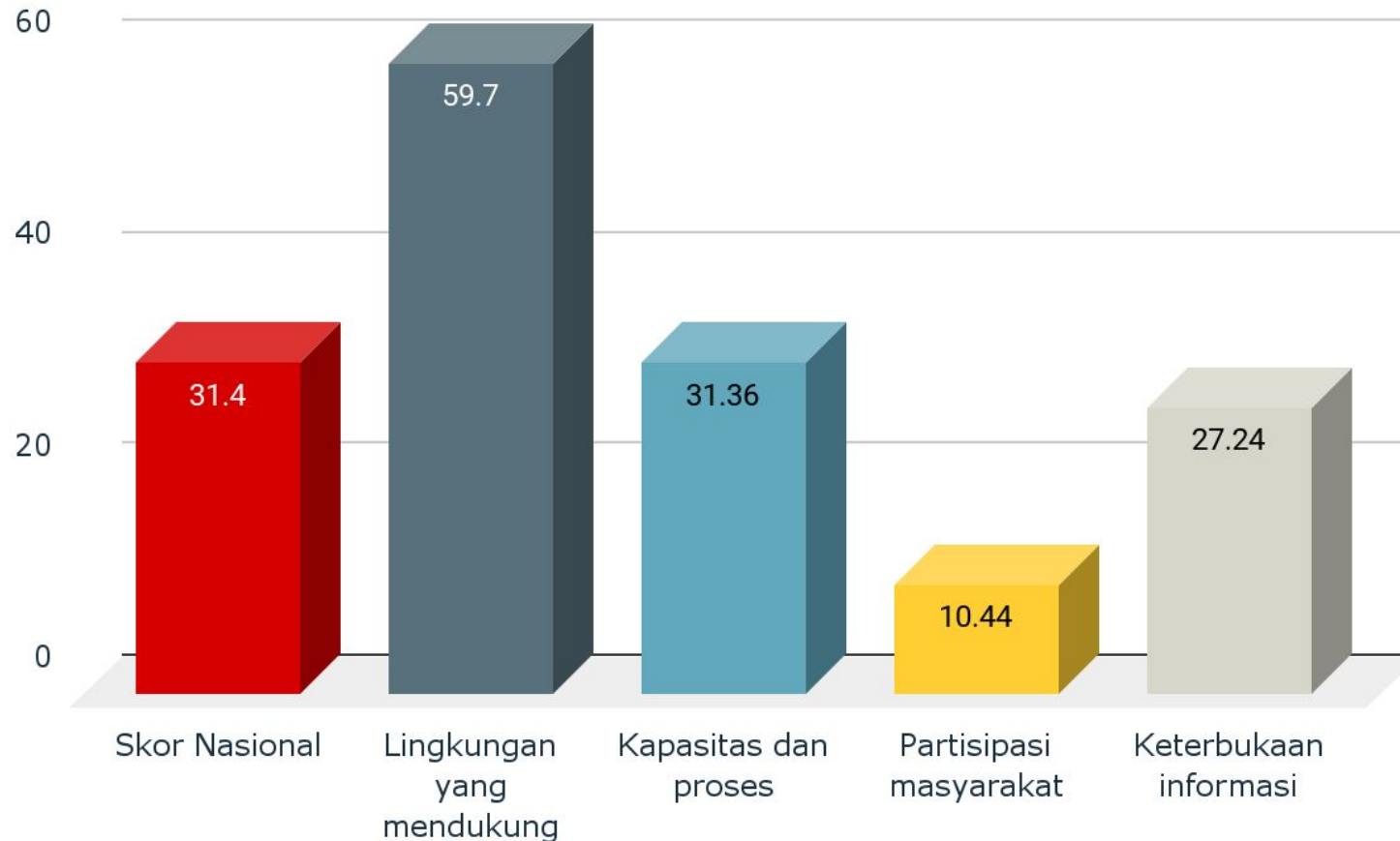
1. Dalam proses evaluasi, interaksi dengan EP dimulai dengan mengirimkan undangan resmi untuk berpartisipasi dalam survei ITI. Survei ini mencakup dimensi-dimensi yang dievaluasi dan pertanyaan terkait transparansi proyek.
2. Proses berlanjut dengan pengiriman pengingat kepada EP yang belum merespons undangan setelah periode waktu 1 (satu) minggu setelah diberikan survey.
3. Jika EP merespons undangan, mereka diberikan form survei dan diminta untuk mengisi survei sesuai dengan panduan yang disediakan dalam batas waktu 1 (satu) minggu.
4. Jika EP mengalami penundaan atau tidak merespons dalam batas waktu yang ditentukan, proses selanjutnya adalah dengan mengirimkan surat pengingat dan upaya komunikasi lanjutan untuk memfasilitasi partisipasi.



Seluruh entitas pengadaan mengisi survey

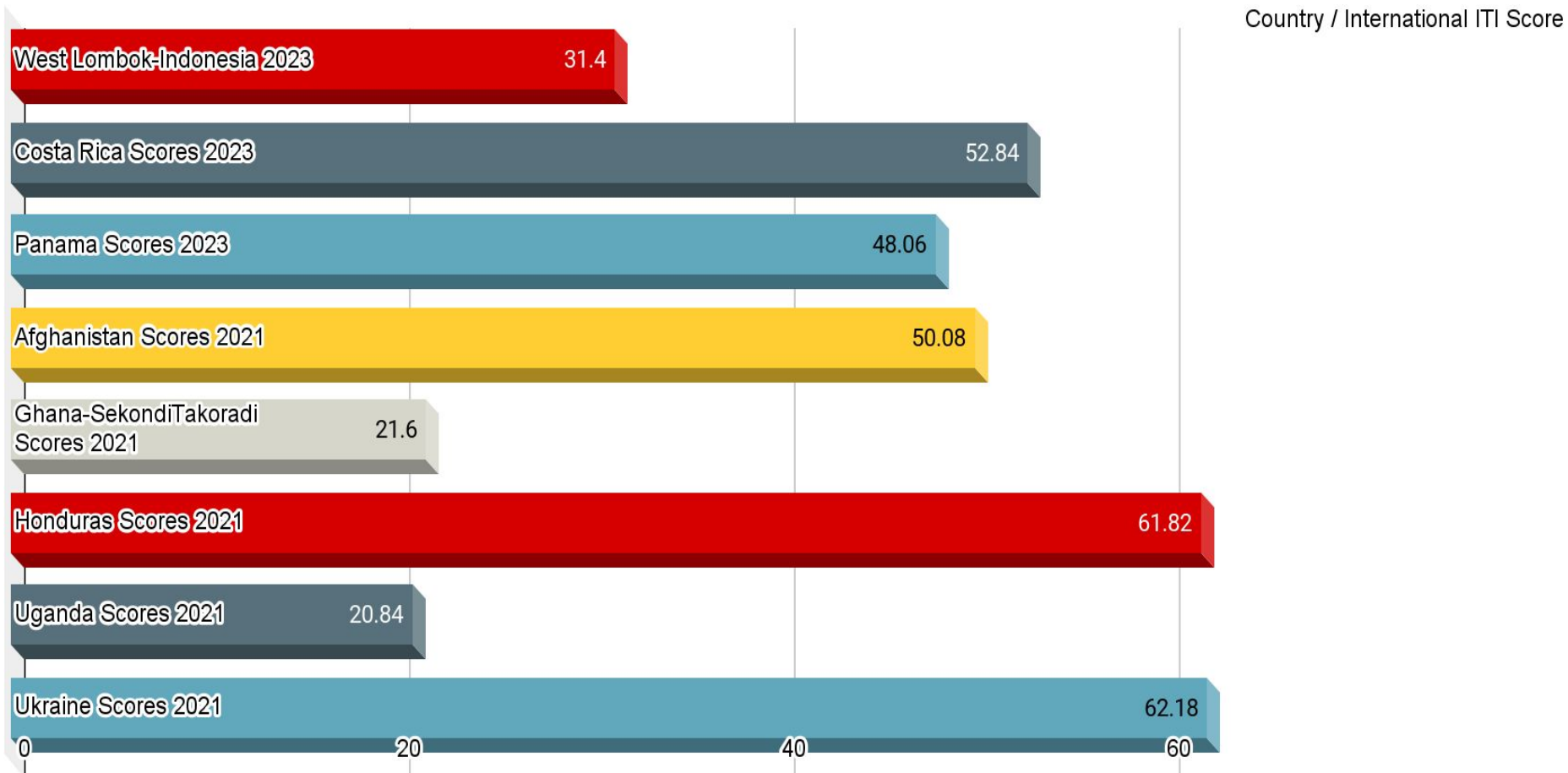
## 3. Hasil

# Skor ITI Kabupaten Lombok Barat



- perlu adanya perbaikan hampir di seluruh dimensi keterbukaan data
- Skor tertinggi pada Lingkungan yang mendukung
- Skor terendah pada partisipasi masyarakat
- belum adanya staff khusus informasi
- keterbukaan data publik yang masih terbatas hanya di tahap tender saja

# Perbandingan internasional: ITI Kabupaten Lombok Barat



- skor ITI Lombok Barat berada diatas beberapa program CoST
- cenderung berada dibawah keseluruhan program CoST.

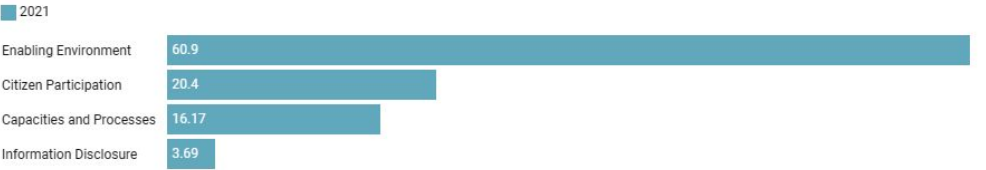
# Perbandingan internasional: ITI Kabupaten Lombok Barat Cont.



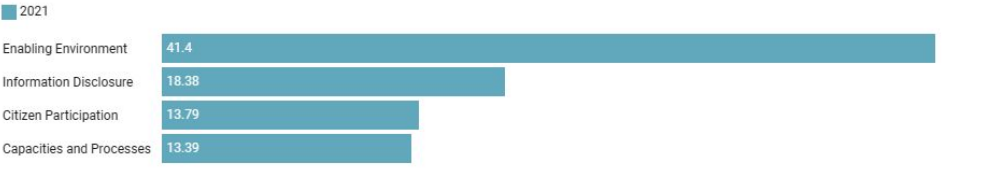
Afghanistan National ITI scores



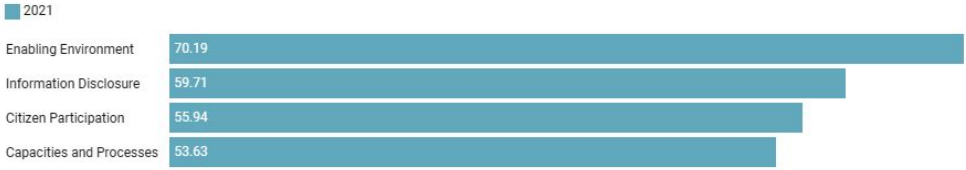
Costa Rica National ITI scores



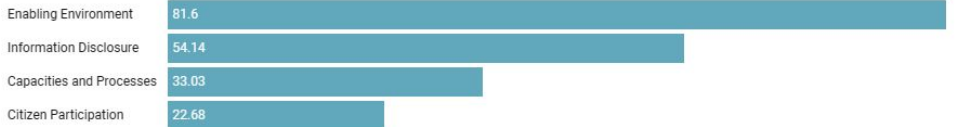
Ghana: ITI Sub-national Score



Uganda National ITI Scores



Honduras ITI National Score



National ITI scores (2023): Panama

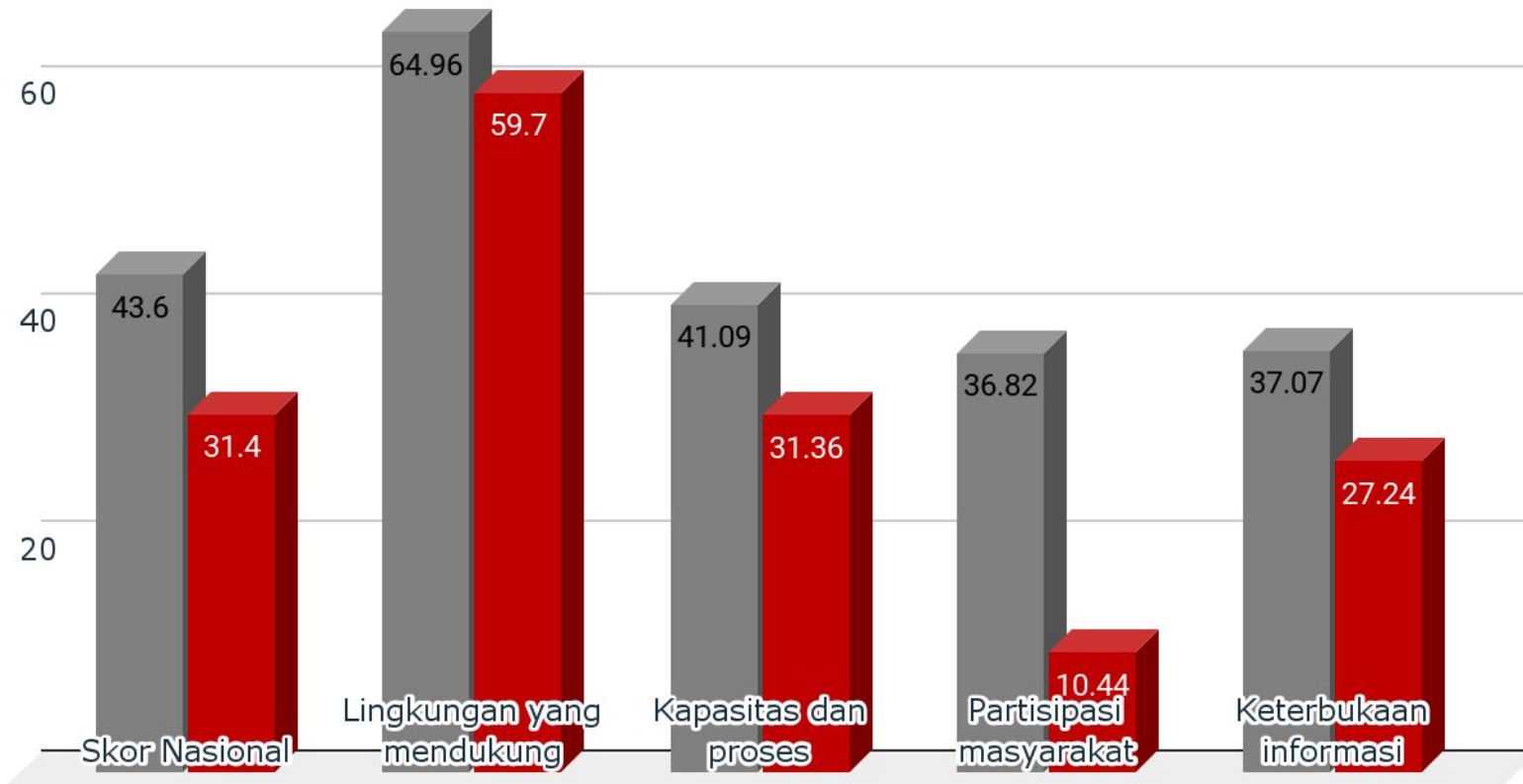


Ukraine National ITI Scores

- Trend skor hampir sama
- Nilai tinggi pada lingkungan yang mendukung
- Dimensi lainnya terlihat kurang

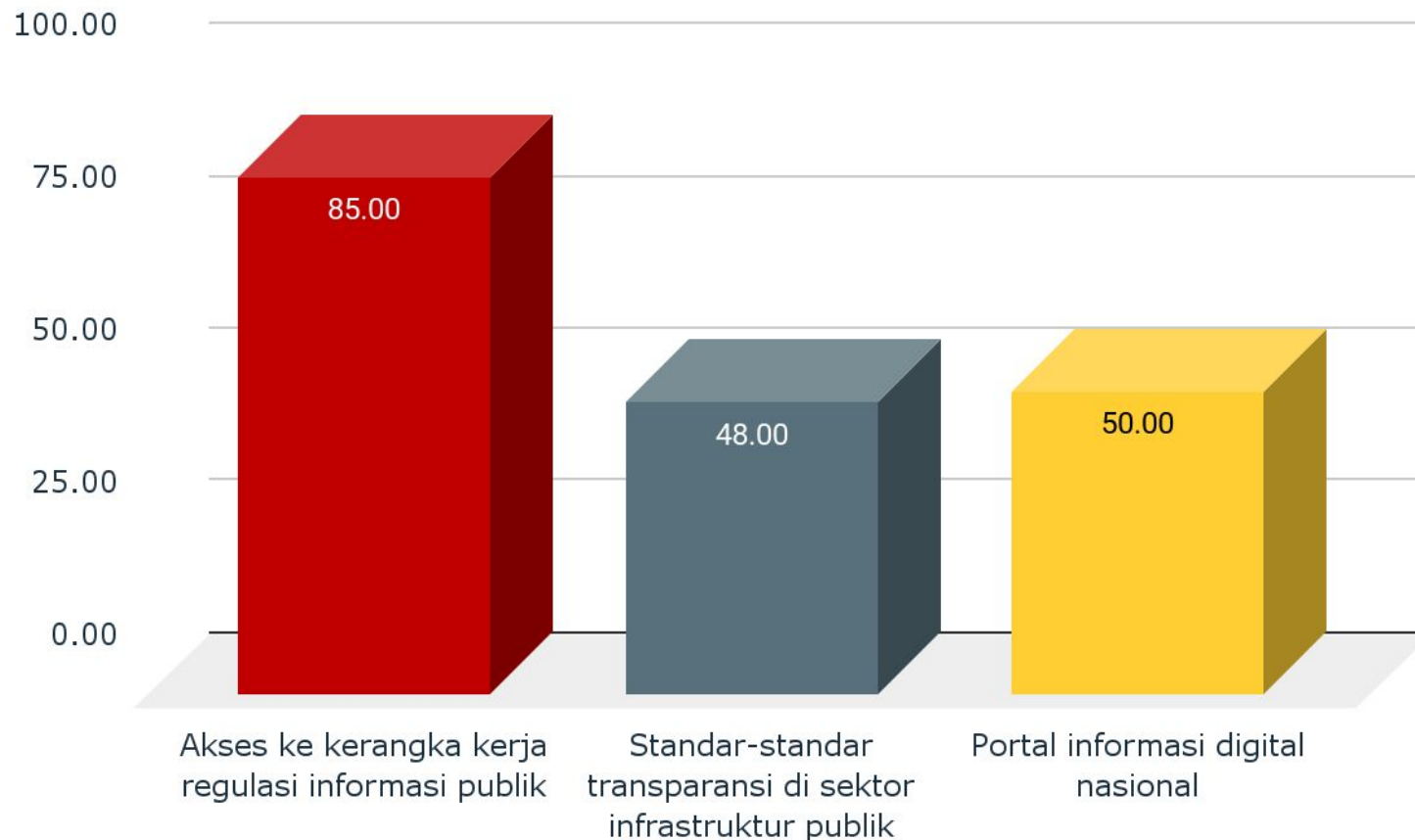
# Perbandingan internasional: Dimensi ITI

■ Skor rata-rata global ■ Skor Lombok Barat



- Semua dimensi berada di bawah rata-rata internasional
- Selisih nilai rata-rata 12,2
- Dimensi 1,2 dan 4 terputus kecil dengan selisih 5-10 poin
- Partisipasi masyarakat terputus jauh dengan selisih 26,4 poin

# Lingkungan yang mendukung



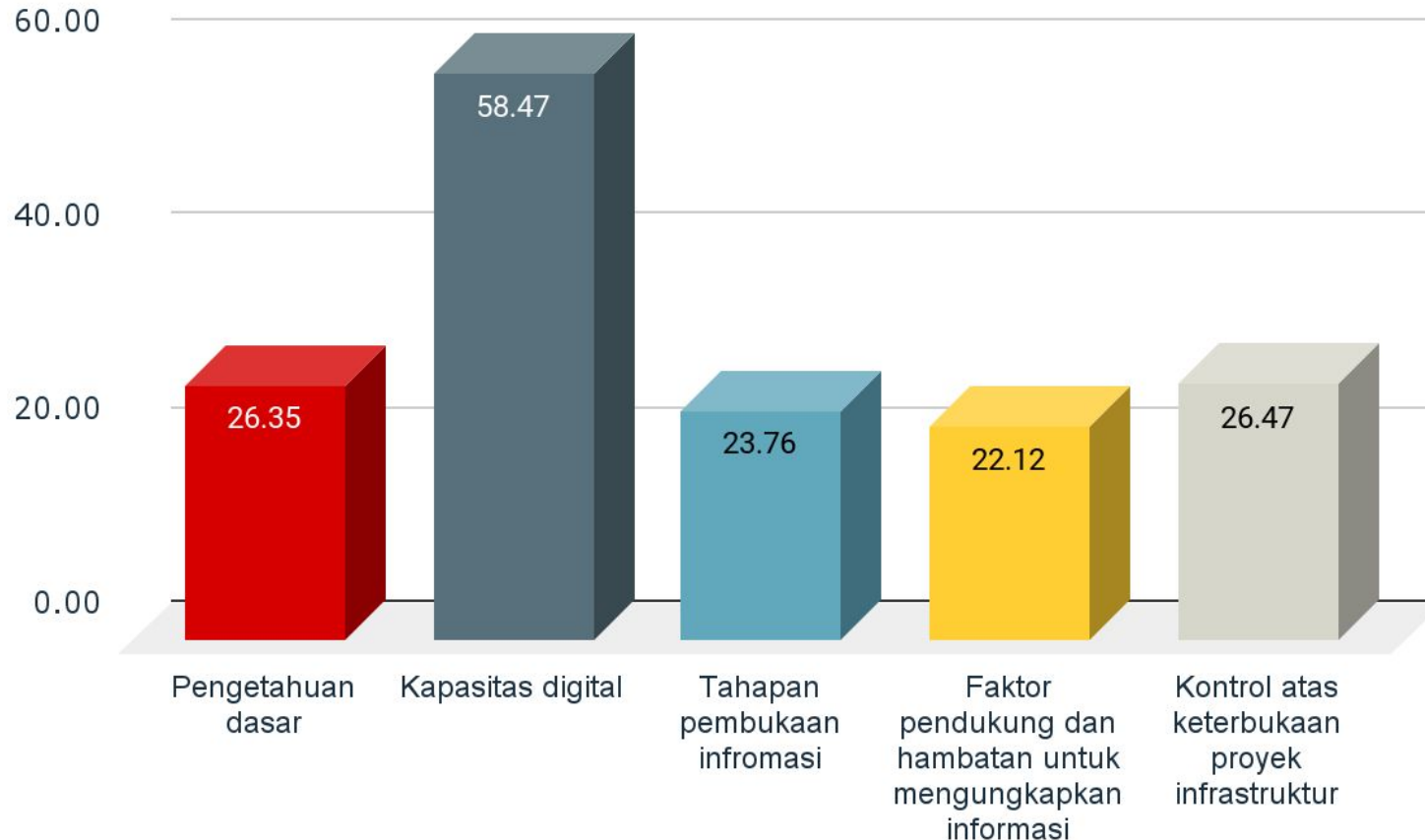
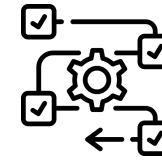
## Indikator dengan nilai tertinggi

- Akses ke kerangka kerja regulasi informasi publik
- Sanksi atas ketidapatuhan terhadap mandat akses informasi publik
- Kemudahan akses informasi dalam platform informasi digital

## Indikator dengan nilai terendah

- Sistem informasi geografis (GIS) proyek infrastruktur
- Standar keterbukaan data infrastruktur
- Proactive publication of information on public infrastructure projects

# Kapasitas dan proses



Indikator dengan nilai tertinggi

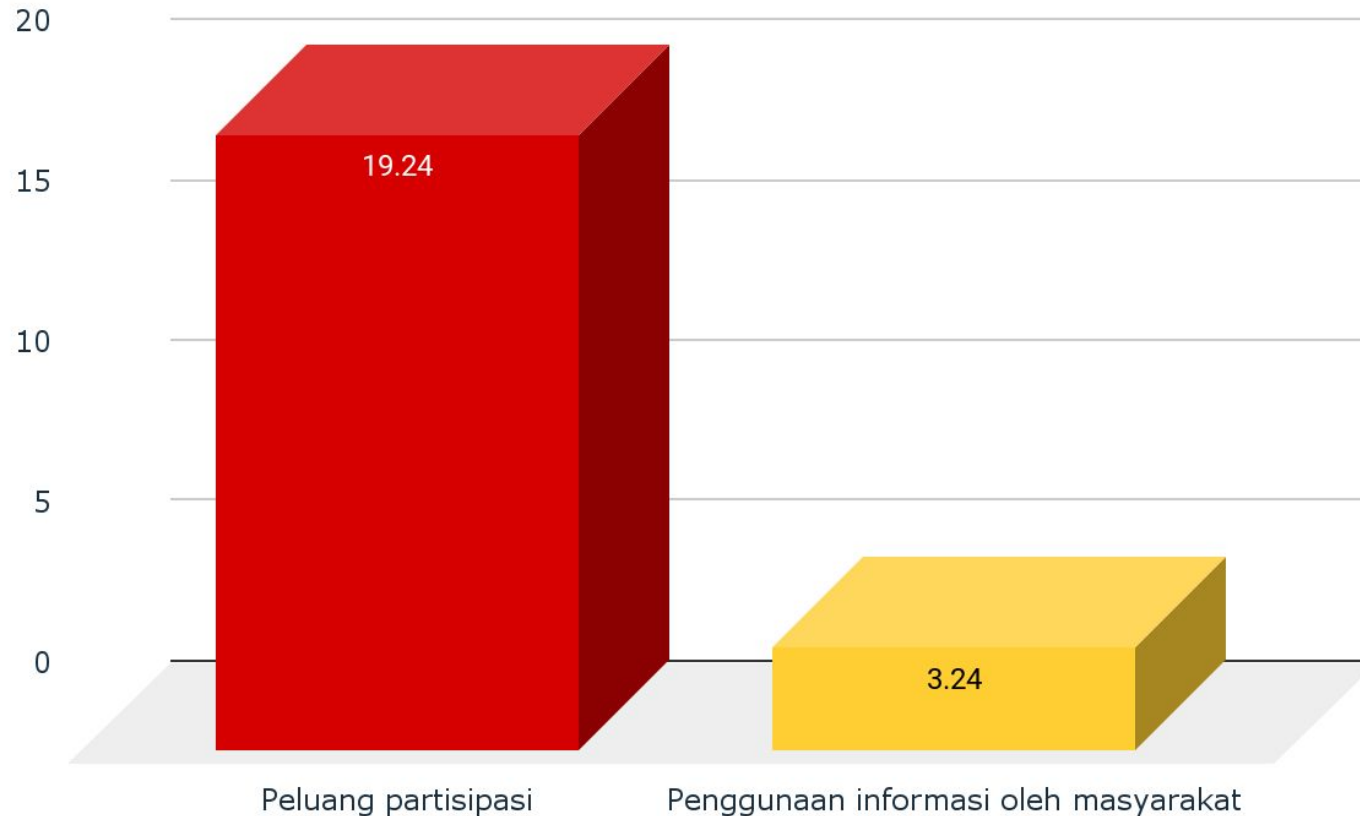
- Perangkat komputer
- Konektivitas ke internet
- Situs web instansi

Indikator dengan nilai terendah

- Visualisasi berdasarkan data proyek infrastruktur
- Rencanakan untuk mengurangi keterbatasan dalam mempublikasikan informasi
- Hambatan birokrasi untuk mempublikasikan informasi



# Partisipasi masyarakat



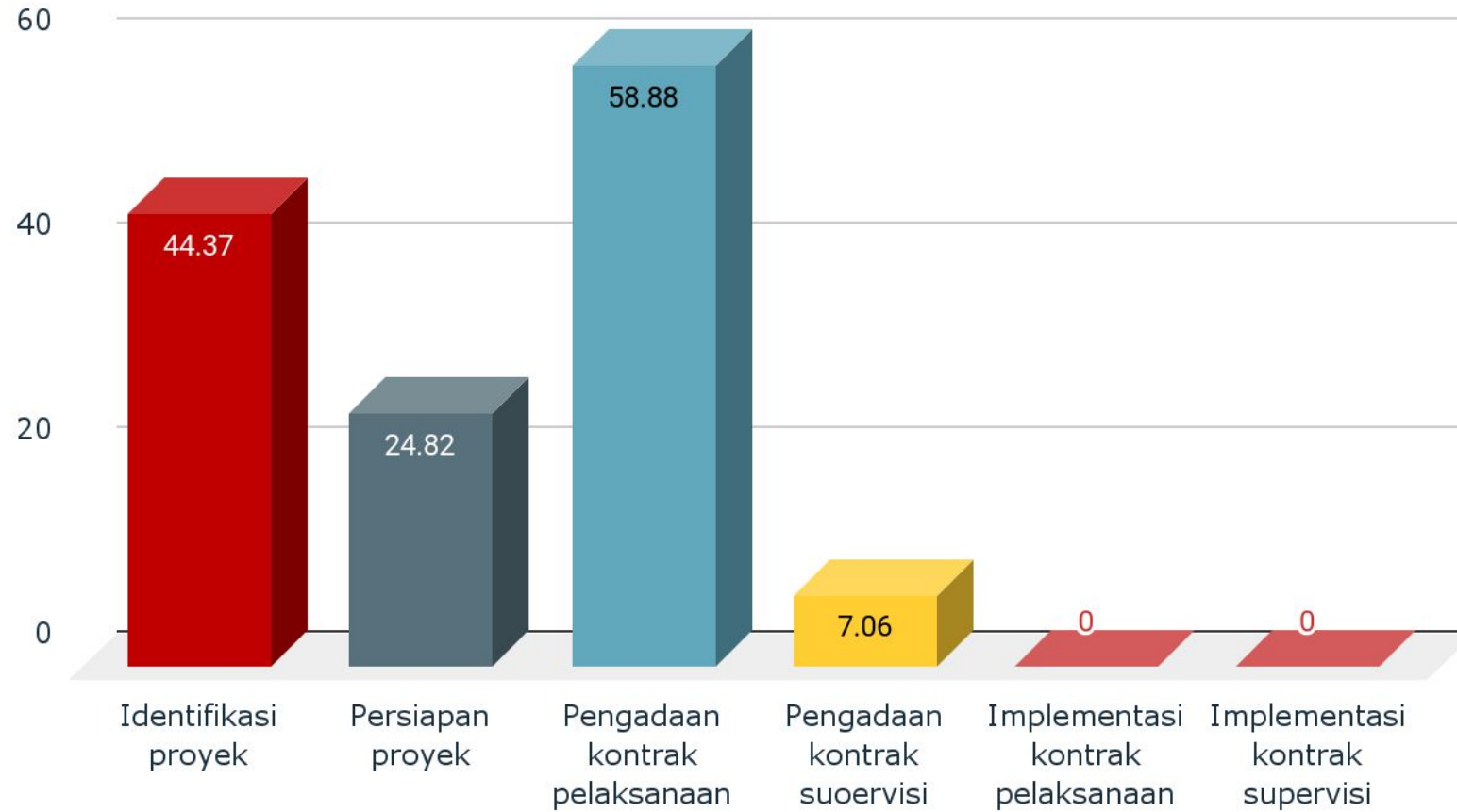
Indikator dengan nilai tertinggi

- Partisipasi warga negara yang terlembaga
- Partisipasi masyarakat dalam proyek infrastruktur
- Kesadaran akan peluang partisipasi

Indikator dengan nilai terendah

- Bukti penggunaan institusional
- Warga menggunakan bukti
- Perbaikan respons sebagai terhadap partisipasi warga

# Keterbukaan informasi



Indikator dengan nilai tertinggi

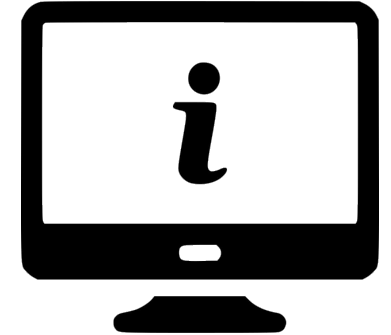
- Pemilik proyek
- Sumber pendanaan
- Jumlah perusahaan yang menawar

Indikator dengan nilai terendah

- Sektor dan subsektor
- Durasi kontrak
- Lingkup pekerjaan kontrak

# Keterbukaan informasi Cont. Indikator dengan nilai 0

1. Tujuan
2. Dampak lingkungan
3. Dampak lahan dan pemukiman
4. Detail kontak
5. Judul resmi kontrak
6. Semua indikator pada data supervisi proyek infrastruktur kecuali proses pengadaan dan jumlah perusahaan yang ikut dalam tender.
7. Semua indikator dalam tahap pelaksanaan dari kontrak konstruksi proyek infrastruktur.

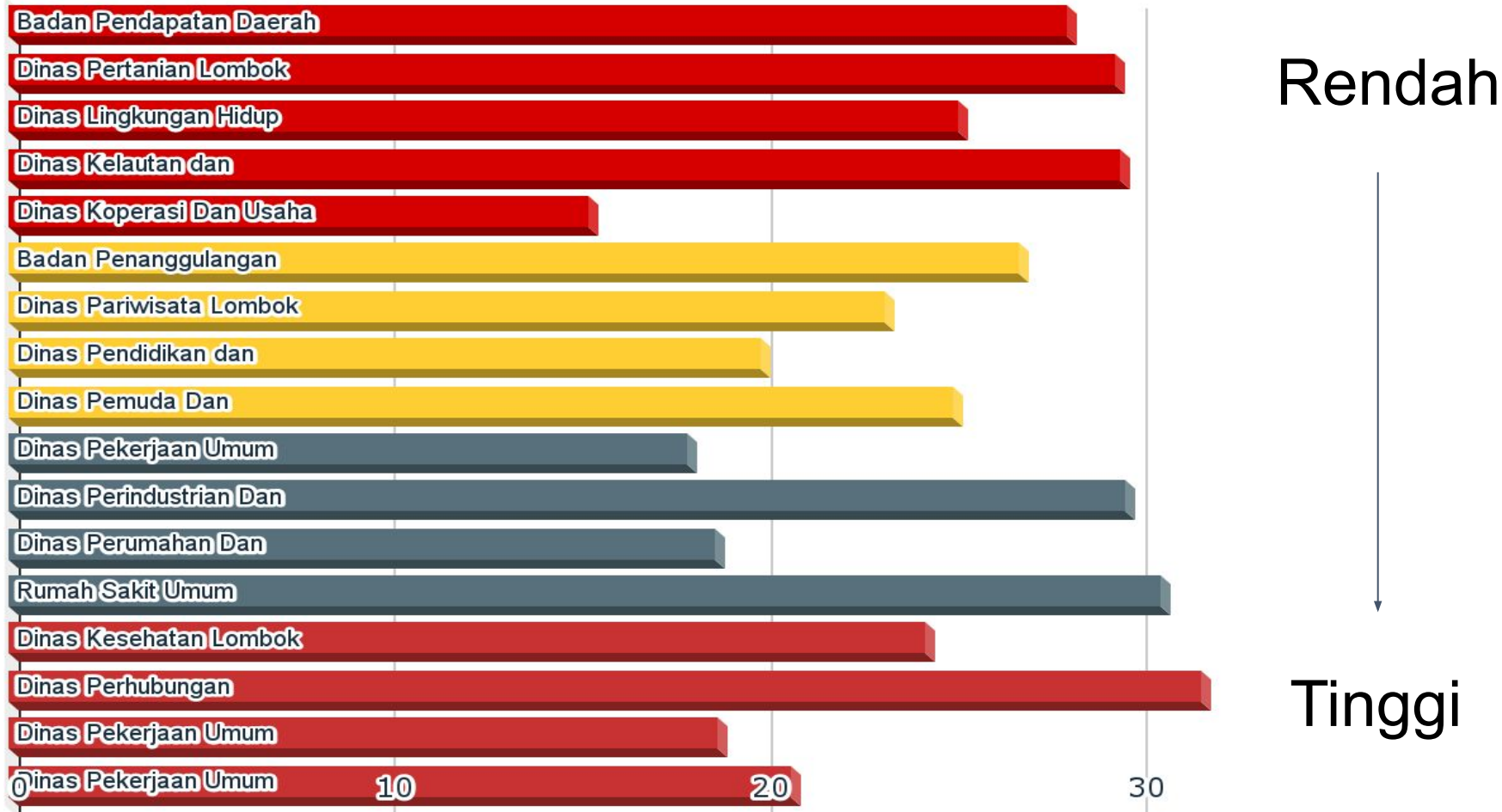


## 3.1 Hasil masing-masing entitas pengadaan

# Entitas Pengadaan ITI: Top 10

Ranking	Entity name	ITI Score	Capabilities and processes	Citizen participation	Information disclosure
1	Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat	31.71	38.22	14.35	23.8
2	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat	30.62	51.79	25.8	25.6
3	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat	29.73	43.6	0	23.8
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat	29.54	45.39	5.4	27.95
5	Dinas Pertanian Lombok Barat	29.45	38.68	15.9	30.8
6	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat	28.18	30.15	5.1	27.95
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	26.89	44.89	14.35	27.95
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat	25.28	32.84	25.8	31.1
9	Dinas Pemuda Dan Olahraga	25.11	28.45	0	27.95
10	Dinas Kesehatan Lombok Barat	24.41	32.26	5.4	29.6
Rata-rata keseluruhan entitas		24.48	33.03	22.68	54.14

# Entitas Pengadaan ITI: Perbandingan berdasarkan total anggaran proyek



- belum terlihat adanya keterkaitan khusus dengan skor ITI dari masing-masing Entitas Pengadaan

# Entitas Pengadaan ITI: Top 5 proyek

Peringkat	Entitas Pengadaan	Nama Proyek	Skor ITI
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru	32.9
2	Dinas Kesehatan Lombok Barat	Pembangunan Rumah Genset (PINJAMAN DAERAH) RSUD Awet Muda Narmada	31.1
2	Dinas Pariwisata Lombok Barat	Pelaksanaan Penataan Kawasan Taman Lingsar	31.1
2	Dinas Pariwisata Lombok Barat	Lampu Taman Tenaga Surya (DAK)	31.1
2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat	Pengadaan Rumah Kompos kapasitas 1 ton/hari	31.1
2	Dinas Pertanian Lombok Barat	Pembangunan Prasarana Perkantoran BPP Kecamatan Narmada	31.1
3	Dinas Pertanian Lombok Barat	Perbaikan RPH Ruminansia Kec. Lingsar (DAK)	30.5
4	Dinas Kesehatan Lombok Barat	Pembangunan Puskesmas Banyumulek (DAK AFIRMASI)	28.1
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat	Integrasi Pergaraman	27.95
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat	Rekonsiliasi/Integrasi Pegaraman di Desa Buwun Mas	27.95
5	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pembangunan Lapak PKL TP 2019 KEMENTERIAN KOPERASI dan UKM RI	27.95
5	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Revitalisasi Pasar Rakyat yang di Kelola oleh Koperasi	27.95
5	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat	Pembangunan Gedung Kantor BKP Gunungsari	27.95
5	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat	Pembangunan Gedung Kantor BKP Kediri	27.95
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rehabilitasi Talud Sungai Eyat Mayang kec. Lembar	27.95
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rehabilitasi Jembatan Kelep Desa Taman Sari Kecamatan Sekotong	27.95
5	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pembangunan Lanjutan GOR Mini	27.95
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air	Rehabilitasi / perbaikan prasarana irigasi (DAK Reg) Daerah Irigasi Pesongoran Kuripan	27.95
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI.Keru (DAK Penugasan)	27.95

## 4. Kesimpulan



# Kesimpulan

1. Skor ITI Lombok Barat adalah 31.4 dari nilai maksimal 100, nilai ini masih dibawah rata-rata internasional anggota CoST yaitu 43.6. Dibutuhkan tambahan skor 12.2 untuk berada di rata-rata internasional.
2. Skor dimensi 1 (Lingkungan yang mendukung) merupakan skor tertinggi untuk nilai ITI Lombok Barat di angka 59.7. Skor masih dibawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 64.9. Dimensi 1 memiliki gap terendah dari dimensi lainnya yaitu sebesar 5.2.
3. Skor dimensi 2 (Kapasitas dan proses) merupakan skor tertinggi kedua dengan nilai 31.36. Skor masih di bawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 41. Dimensi 2 memiliki gap sebesar 9.64 dari rata-rata internasional.
4. Skor dimensi 3 (Partisipasi masyarakat) merupakan skor terendah dengan nilai 10.44. Skor masih di bawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 36.83. Dimensi 3 memiliki gap tertinggi yaitu sebesar 26.38 dari skor rata-rata internasional.
5. Skor dimensi 4 (Keterbukaan informasi) berada di skor 27.24. Skor masih di bawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 37.06. Dimensi 45 memiliki gap 9.82 dari skor rata-rata internasional.
6. Tidak ada entitas yang memiliki staff informasi resmi yang khusus menangani hal-hal terkait permintaan informasi maupun keterbukaan informasi.
7. Portal keterbukaan data infrastruktur yang dapat diakses oleh publik yaitu Ipse (<http://www.lipse.lombokbaratkab.go.id/eproc4/>) yang merupakan portal untuk tahap tender pengadaan barang dan jasa. Portal ini tidak memberikan informasi tentang tahapan proyek lain yang relevan, seperti persiapan dan pelaksanaan.
8. Tidak ditemukan portal keterbukaan data yang resmi terkait siklus proyek lainnya setelah proses tender.
9. Tidak ditemukan adanya keterbukaan data untuk supervisi proyek infrastruktur.

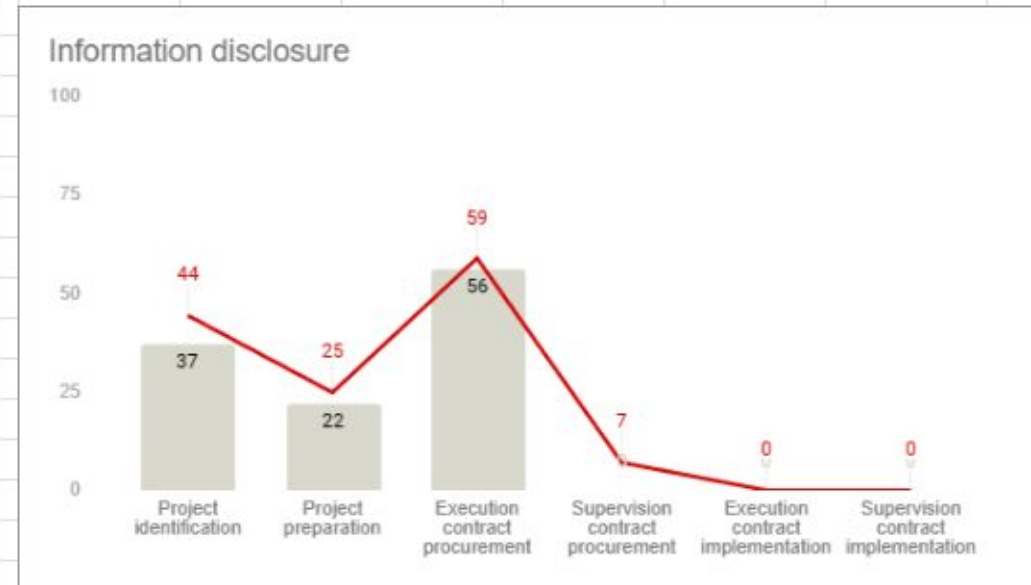
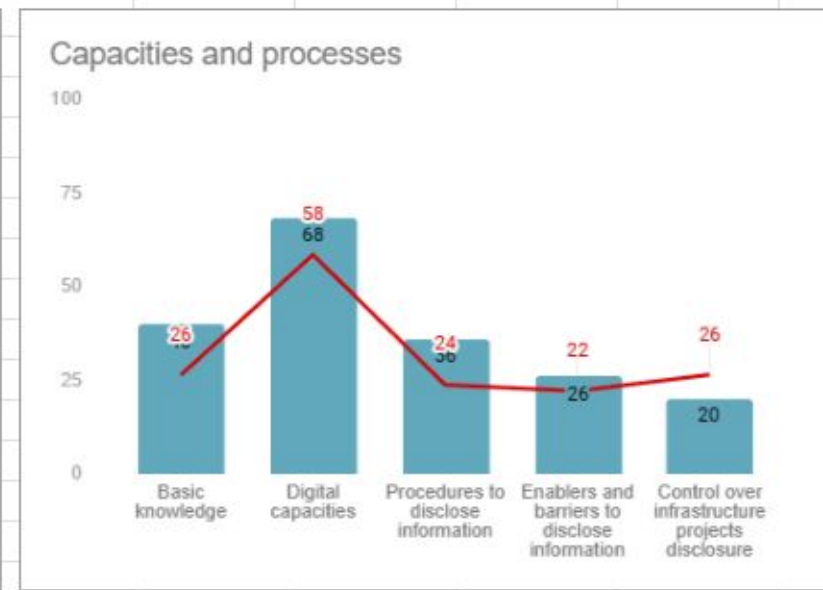
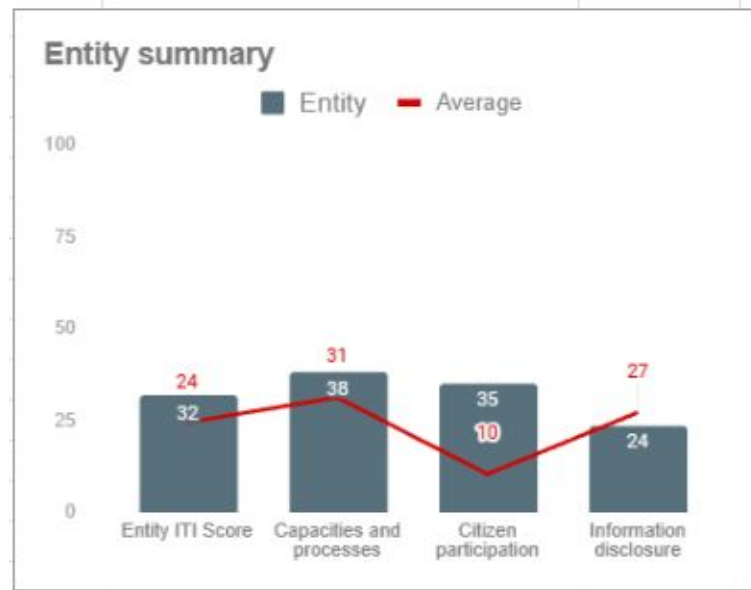
# Rekomendasi

1. Perlu adanya staff informasi dalam setiap entitas pengadaan atau terpusat yang menangani hal-hal terkait permintaan informasi dan keterbukaan data infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjuk satu staff dari masing-masing-PE untuk secara resmi menjadi staff informasi dan tertuang dalam suatu regulasi.
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan untuk staff informasi terutama terkait standar data serta sanksi dalam pelanggaran undang-undang keterbukaan data. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepada staff informasi yang ditunjuk oleh masing-masing EP.
3. Konsultasi publik perlu diadakan untuk semua proyek infrastruktur dan mengikutsertakan staff informasi agar dapat terdokumentasi dengan baik.
4. Staff informasi yang ditunjuk wajib mengikuti Musrenbang dan mendokumentasikan hal-hal penting dalam kegiatan partisipasi publik lainnya.
5. Perlu adanya portal keterbukaan informasi infrastruktur yang diperuntukkan untuk masyarakat agar mendapatkan informasi yang mudah, cepat, dan gratis dalam semua siklus pengadaan infrastruktur publik, berdasarkan standar CoST IDS atau OC4IDS.
6. Staff informasi perlu melakukan perbaruan data berkala minimal tiga bulan sekali di portal keterbukaan data infrastruktur yang ada.
7. Perlu adanya studi identifikasi birokrasi yang ada di dalam proses keterbukaan informasi infrastruktur.
8. Perlu adanya sosialisasi terkait portal-portal keterbukaan data bagi masyarakat sipil dan pengamat transparansi infrastruktur maupun transparansi lainnya untuk membaca dan menggunakan informasi tersebut..
9. Perlu peningkatan keterbukaan data untuk semua siklus pengadaan proyek infrastruktur.
10. Perlu adanya keterbukaan data khusus untuk supervisi proyek infrastruktur.

## 5. Lampiran: Procuring entities dashboard

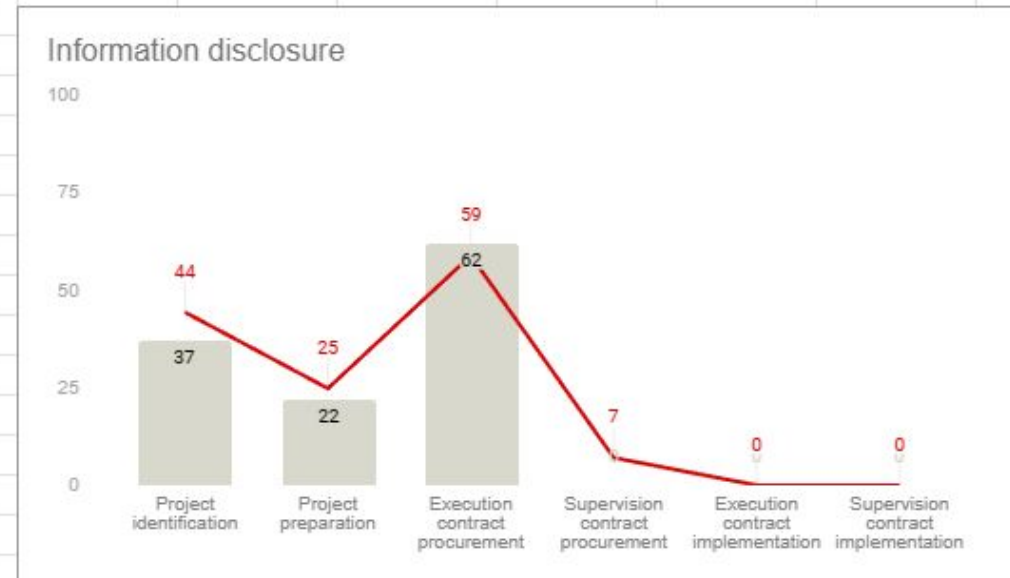
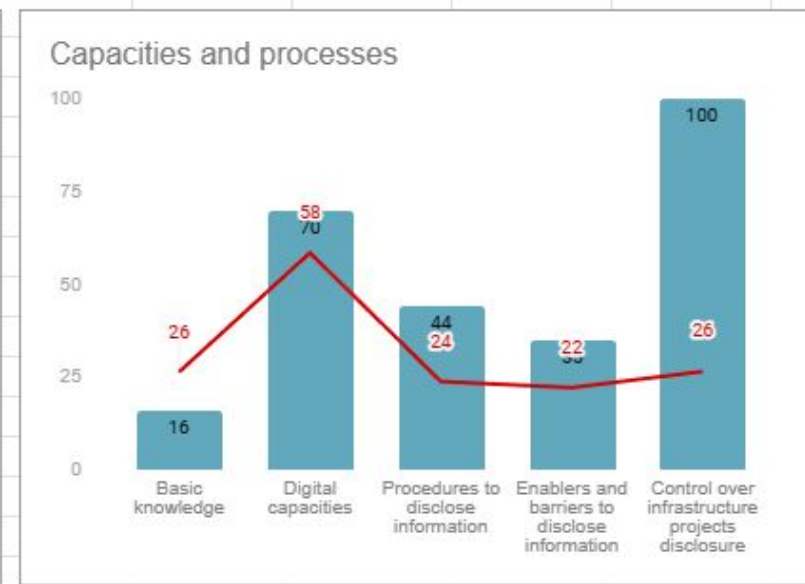
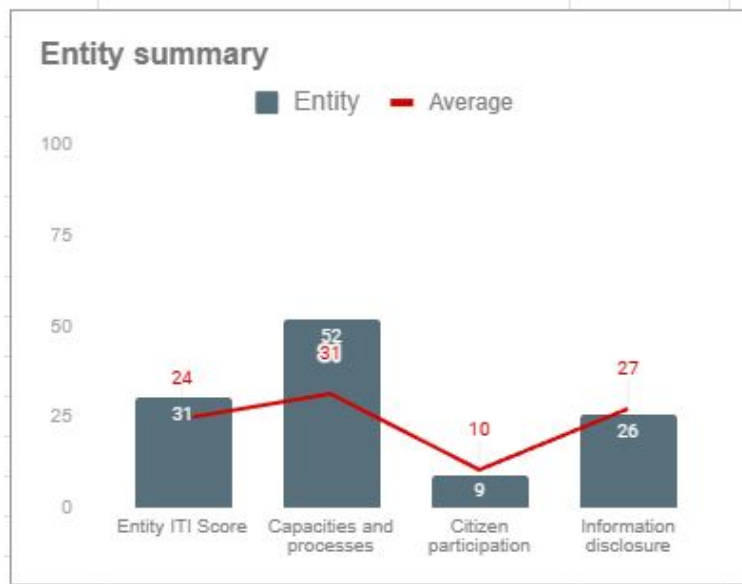
# Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat

## Posisi 1



# Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat

## Posisi 2



# Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

## Posisi 3

